



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Pahlawan No. 1 Painan

Telp/Fax. (0756) 21601 | Pos. El.: Inspektoratpessel@yahoo.co.id.

LAPORAN HASIL REVIU

Laporan Kinerja (LKj)

DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran 2025

Nomor : 700.1.2.8/374 /INSP/2026

Tanggal : 12 Maret 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 12 Maret 2026

Inspektur,



Eyafauza Yuliasman, S.E., MSi.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670712 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

Nomor : 700.1.2.8/374/INSP/2026 Painan, 12 Maret 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Laporan Kinerja Dinas
Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Yth. Bupati Pesisir Selatan
di
Painan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) adalah penyajian manajemen dan substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Maret 2026 (tiga hari kerja) sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.6.3/38/INSP/2026 tanggal 27 Februari 2026.

Reviu bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja perangkat daerah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Ruang lingkup pelaksanaan reviu yaitu reviu dilakukan terhadap metode pengumpulan data/informasi untuk menguji keandalan dan akurasi data dan informasi kinerja. Reviu dilakukan atas keselarasan perencanaan strategis antar tingkat di dalam perangkat daerah, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan atas laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Berdasarkan hasil pengujian ditemui dokumen reviu LKj belum dilengkapi sebagai berikut:

- a. LKj belum melampirkan dokumen bukti dukung/eviden atas realisasi seluruh indikator kinerja.
- b. Data dukung rencana aksi kepala OPD Tahun 2025 sudah ada tapi dalam dokumen rencana aksi tidak ada mencantumkan target rencana aksi OPD 2025 per triwulannya
- c. Data dukung realisasi rencana aksi kepala OPD Tahun 2025 sudah ada tapi dalam dokumen realisasi rencana aksi tidak ada mencantumkan realisasi rencana aksi OPD 2025 per triwulannya
- d. Tidak ada surat penyampaian LKj ke Bagian Organisasi.

2. Pengujian atas kesesuaian outline LKj perangkat daerah dengan standar pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada BAB I belum menyajikan Informasi tentang permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi.
- b. Outline pada BAB II telah sesuai.
- c. Outline pada BAB III telah sesuai.
- d. Pada lampiran LKj telah melampirkan dokumen perjanjian kinerja individu dan Penghargaan/inovasi (jika ada).

3. Pengujian atas kesesuaian tujuan sasaran pada LKj OPD dengan Renstra dan PK tahun 2025

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak bisa dilakukan pengujian yang memadai antara dokumen Renstra, LKj dan PK karena tidak ada pemisah antara tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dalam dokumen Resntra.

4. Pengujian atas kesesuaian target kinerja pada LKj dengan target pada Renstra dan PK tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Target kinerja tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada LKj dan PK tidak selaras/sesuai dengan Renstra.
 - b. Target kinerja pada PK tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tidak selaras dengan target kinerja pada Renstra dan LKj
 - c. Cara penetapan target indikator kinerja pada LKj dan PK tidak mengacu kepada Renstra.
 - d. LKj sudah menyajikan cara menetapkan target namun tidak selaras dengan dokumen Renstra dan PK.
 - e. Seluruh target kinerja yang dimuat pada dokumen PK telah disajikan dalam LKj namun tidak selaras dengan dokumen Renstra
5. Pengujian atas kesesuaian capaian kinerja dengan data kinerja secara rinci/analisa yang memadai dalam LKj.

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan.
 - b. LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra.
 - c. LKj belum dilengkapi dengan dokumen sumber data pendukung capaian kinerja.
6. Pengujian atas kelengkapan penyajian LKj OPD dengan data pembandingan yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbandingan kinerja dengan beberapa tahun terakhir hanya membandingkan capaian kinerja, belum membandingkan target dan realisasi kinerja.
 - b. LKj telah menyajikan analisis data pembandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah/renstra secara memadai.
 - c. LKj telah menyajikan informasi data pembandingan dengan kinerja Nasional/Regional/Provinsi/Kabupaten/Kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja).
7. Pengujian atas penyajian analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dalam LKj.

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

LKj telah menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

8. Pengujian atas penyajian efisiensi penggunaan sumber daya pada LKj.

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

LKj telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja.

9. Pengujian atas penyajian realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil pengujian ditemui sebagai berikut:

LKj sudah menyajikan informasi realiasi anggaran yang terkait dengan capaian kinerja.

10. Pengujian atas tindak lanjut atas rekomendasi APIP atas kelemahan LKj tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 telah ditindaklanjuti pada LKj 2025

Disarankan kepada Bupati Pesisir Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Melengkapi dokumen pendukung LKj sebagai berikut:

- a. Melampirkan LKj dengan dokumen bukti dukung/eviden atas realisasi seluruh indikator kinerja.
- b. Melengkapi data dukung rencana aksi kepala OPD Tahun 2025 dengan menjelaskan besaran target yang ditentukan per triwulannya.
- c. Melengkapi data dukung realisasi rencana aksi kepala OPD Tahun 2025 dalam dokumen realisasi rencana aksi OPD 2025 dengan menjelaskan realisasi rencana aksi per triwulanya
- d. Buatlah secara formal surat penyampaian LKj ke Bagian Organisasi yang ditandatangani oleh kepala OPD.

2. Pada outline LKj agar melengkapi penyajian sebagai berikut:

Sajikan pada BAB I permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi.

3. Dokumen Renstra, PK dan LKj diselaraskan dalam menetapkan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, sasaran strategis, dan indikator kinerja sebagai berikut.

- Agar pada dokumen renstra untuk dapat disajikan pemisahan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran sehingga dapat dilakukan pengujian terhadap LKj dan PK terhadap Renstra.
4. Pengujian atas kesesuaian target kinerja pada LKj dengan target pada Renstra dan PK Tahun 2025 sebagai berikut:
- Agar dalam membuat target indikator kinerja pada dokumen LKj agar mengacu dan menyelaraskannya dengan target indikator sasaran yang ada di dalam dokumen renstra dan PK. Jika terdapat perbedaan agar diberikan penjelasannya secara memadai pada dokumen LKj Bab II.
5. Kesesuaian capaian kinerja pada LKj dengan data kinerja sebagai berikut:
Lengkapi LKj dengan menyajikan informasi sumber data pendukung atas realisasi kinerja sesuai dengan sumber data yang telah ditetapkan pada LKj.
6. Pengujian atas penyajian LKj OPD sudah dilengkapi data pembandingan yang dibutuhkan
Melengkapi informasi perbandingan kinerja beberapa tahun terakhir dengan membandingkan target, realisasi dan capaian kinerja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari semua pihak sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Laporan Kinerja pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Inspektur,
Evafauza Yuliasman, S.E., MSi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670712 199202 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

**CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)			
	Reviu terhadap dokumen pendukung LKj belum lengkap. Berdasarkan hasil pengujian atas kelengkapan dokumen reviu Laporan Kinerja (LKj), ditemui Dokumen reviu LKj yang belum lengkap sebagai berikut: 1. LKj belum melampirkan dokumen bukti pendukung/evident atas realisasi seluruh Indikator kinerja. 2. Data Dukung Rencana Aksi Kepala OPD Tahun 2025 sudah ada tapi dalam dokumen rencana aksi tidak ada mencantumkan target rencana aksi OPD 2025 per triwulannya 3. Data Dukung Realisasi Rencana Aksi Kepala OPD Tahun 2025 sudah ada tapi dalam dokumen realisasi rencana aksi tidak ada mencantumkan realisasi rencana aksi OPD 2025 per triwulannya 4. Tidak ada surat penyampaian LKj ke Bagian Organisasi.	Reviu LKj dilengkapi dengan dokumen pendukung yang digunakan untuk penyusunan LKj Perangkat Daerah, yaitu: 1. Renstra Perangkat Daerah. 2. RKT 2025 3. IKU OPD 4. Dokumen Penjelasan IK Ka OPD 5. PK Ka OPD dan pejabat lainnya 6. Laporan Kinerja Tahun 2025 7. Data Dukung Capaian Kinerja yang disajikan dalam LKj OPD. 8. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Th sebelumnya 9. Rencana Aksi Ka OPD Tahun 2025 10. Realisasi Rencana Aksi Kepala OPD Tahun 2025 (Tw I s.d. IV) 11. Pengukuran Kinerja Kepala OPD Tahun 2025 12.a Form Rekap DPA 2.2. SKPD TA 2025 12.b Form keseluruhan anggaran 13.a Cascading Tahun 2025 13.b Crosscutting (kalau ada) 14. Surat Penyampaian LKj ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pesisir Selatan beserta tanda terima 15. Dokumen bukti dukung penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025	Agar melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Melampirkan LKj dengan bukti dokumen pendukung/evident atas realisasi seluruh indikator kinerja. 2. Melengkapi Data Dukung Rencana Aksi Kepala OPD Tahun 2025 dengan menjelaskan besaran target yang ditentukan per triwulannya. 3. Melengkapi Data Dukung Realisasi Rencana Aksi Kepala OPD Tahun 2025 dalam dokumen realisasi rencana aksi OPD 2025 dengan menjelaskan realisasi rencana aksi per triwulannya 4. Buatlah secara formal surat penyampaian LKj ke Bagian Organisasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD.	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti

2 Pengujian atas Kesesuaian Outline LKj Perangkat Daerah dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah					
	Pada BAB I belum menyajikan Informasi tentang Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi.	Outline BAB I: BAB I Pendahuluan 1. Gambaran Umum Organisasi 2. Aspek Strategic Organisasi 3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi	Agar Sajikan Pada BAB I Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi..	Telah dikonfirmasi akan ditindaklanjuti.	
a.					
b.	Outline pada BAB II telah sesuai.	outline BAB II: BAB II Perencanaan Kinerja uraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.	-	-	
c.	Outline pada BAB III telah sesuai.	outline BAB III: BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan kinerja nasional, provinsi atau kabupaten/kota lainnya (benchmark kinerja). 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative	-	-	

		solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.		
	Pada Lampiran LKj telah melampirkan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu dan Penghargaan/inovasi (jika ada)	Pada Lampiran: Lampiran Perjanjian Kinerja Individu dan Penghargaan/inovasi (jika ada)	-	-
3	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TUJUAN SASARAN PADA LKj OPD DENGAN RENSTRA DAN PK TAHUN 2025			
	Tidak bisa dilakukan pengujian yang memadai antara dokumen Renstra, LKj dan PK karena tidak ada pemisah antara tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dalam dokumen Renstra.	- Antara dokumen Renstra, PK dan LKj selaras dalam menetapkan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja. Jika terjadi perbedaan, agar disertakan dengan penjelasan yang memadai. - Seluruh tujuan, sasaran pada PK disajikan dalam LKj OPD	Pada dokumen Renstra untuk dapat disajikan pemisahan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran sehingga dapat dilakukan pengujian terhadap LKj dan PK terhadap Renstra	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.
4	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TARGET KINERJA PADA LKj DENGAN TARGET PADA PK dan RENSTRA TAHUN 2025			
	1. Target Kinerja tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada LKj dan PK tidak selaras/sesuai dengan Renstra. 2. target kinerja pada PK tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tidak selaras dengan Target Kinerja pada Renstra dan LKj 3. Cara penetapan target Indikator Kinerja pada LKj dan PK tidak mengacu kepada	1. Antara dokumen Renstra, PK dan LKj selaras dalam menetapkan Target Kinerja. Jika terjadi perbedaan, agar disertakan dengan penjelasan yang memadai. 2. Pada LKj memuat cara dalam menetapkan Target. 3. Seluruh target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen PK disajikan dalam LKj.	Agar Dalam membuat target indikator kinerja pada dokumen LKj agar mengacu dan menyelarasannya dengan target indikator sasaran yang ada di dalam dokumen renstra dan PK. Jika terdapat perbedaan agar diberikan penjelasannya secara memadai pada dokumen LKj Bab II.	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.

	Renstra. 4. LKj sudah menyajikan cara menetapkan target namun tidak selaras dengan dokumen Renstra dan PK. 5. Seluruh target kinerja yang dimuat pada dokumen PK telah disajikan dalam LKj namu tidak selaras dengan dokumen Renstra			
5	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA DENGAN DATA KINERJA SECARA RINCI/ANALISA YANG MEMADAI DALAM LKj			
	1. LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan. 2. LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra. 3. LKj belum dilengkapi dengan dokumen sumber data pendukung capaian kinerja.	1. LKj menyajikan formula dalam mencapai kinerja dan selaras dengan formula yang ditetapkan dalam IKU. 2. LKj menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan. 3. LKj menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra. 4. LKj menyajikan data dukung (sumber data) atas kinerja yang disajikan. 5. Seluruh tujuan, sasaran dan indikator kinerja memuat capaian kinerja dan telah memuat analisa yang memadai	Lengkapi LKj dengan menyajikan informasi sumber data pendukung atas realisasi kinerja sesuai dengan sumber data yang telah ditetapkan pada LKj	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.
6	PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN LKj OPD DENGAN DATA PEMBANDING YANG DIBUTUHKAN			
	1. Perbandingan kinerja dengan beberapa tahun terakhir hanya membandingkan capaian kinerja, belum membandingkan target dan realisasi kinerja.. 2. LKj telah menyajikan analisis data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah/renstra secara memadai. 3. LKj telah menyajikan informasi data perbandingan dengan kinerja nasional/regional/Provinsi/Kabupaten Kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja).	1. LKj menyajikan analisis data perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya secara memadai. 2. LKj menyajikan analisis data perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya (minimal selama periode renstra) secara memadai. 3. LKj menyajikan analisis data perbandingan dengan kinerja nasional/regional/Provinsi/Kabupaten Kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja) secara memadai.	Melengkapi perbandingan beberapa tahun terakhir dengan membandingkan target, realisasi dan capaian kinerja.	Tidak sesuai
7	PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DALAM LKj			
	LKj telah menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan	LKj menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan	Telah sesuai	Telah sesuai

	peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.		
8	PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PADA LKj			
	LKj telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja.	LKj menyajikan efisiensi sumber daya untuk seluruh indikator kinerja yang dijanjikan dalam PK OPD	Telah sesuai	Telah sesuai
9	PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN REALISASI ANGGARAN			
	LKj sudah menyajikan informasi realisasi anggaran yang terkait dengan capaian kinerja.	LKj menyajikan realiasi anggaran yang terkait dengan kinerja berdasarkan form keselarasan anggaran	Telah sesuai	Telah sesuai
10	PENGUJIAN ATAS TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI APIP ATAS KEKURANGAN LKj TAHUN SEBELUMNYA			
	Seluruh rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja sudah ditindaklanjuti dalam LKj OPD tahun 2025	Seluruh rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja tahun sebelumnya ditindaklanjuti dalam LKj OPD tahun 2025 secara optimal.	Telah sesuai	Telah sesuai

*) Tanggung jawab tim terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 4 Maret 2026

WAKIL PENANGGUNG JAWAB,

HARRY KURNIAWAN, S.E., AK., M.Ec.Dev
NIP. 198304092008041001